

**ACCOUNTABILITY AS AN ANTI-CORRUPTION MECHANISM IN VILLAGE  
FUND MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON PUBLIC TRUST: EVIDENCE  
FROM DELI SERDANG REGENCY**

**PERAN AKUNTABILITAS SEBAGAI MEKANISME PENCEGAHAN  
KORUPSI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN  
PUBLIK: BUKTI EMPIRIS DARI KABUPATEN DELI SERDANG**

**Irna Triannur Lubis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Battuta, Medan, Indonesia  
[irnatriannurlubis@gmail.com](mailto:irnatriannurlubis@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of accountability in preventing Village Fund corruption and its implications for public trust in Deli Serdang Regency. The phenomenon of alleged Village Fund mismanagement in recent years highlights the urgency of strengthening transparent and accountable village governance. This research employs a quantitative approach with an explanatory research design and utilizes Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) for data analysis. Data were collected from 198 respondents consisting of village officials and community members through Likert-scale questionnaires. The findings reveal that accountability has a positive and significant effect on corruption prevention and directly influences public trust. Corruption prevention also significantly affects public trust and serves as a partial mediating variable in the relationship between accountability and public trust. These results emphasize that strengthening accountability mechanisms and corruption prevention systems are critical factors in enhancing community trust in Village Fund management. This study contributes theoretically by integrating agency theory and legitimacy theory and offers practical implications for improving village governance systems.*

**Keywords:** *Accountability, Corruption Prevention, Public Trust, Village Fund*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas dalam pencegahan korupsi Dana Desa serta implikasinya terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Deli Serdang. Fenomena dugaan penyimpangan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS). Data diperoleh dari 198 responden yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat desa melalui penyebaran kuesioner skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi, serta berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik. Pencegahan korupsi juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dan berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan sistem pencegahan korupsi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi agency theory dan legitimacy theory serta kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pencegahan Korupsi, Kepercayaan Publik, Dana Desa

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi fiskal melalui kebijakan Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa dirancang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan

masyarakat. Namun, peningkatan alokasi anggaran di tingkat desa juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, dan sektor pemerintahan desa termasuk dalam

kategori rentan penyimpangan. Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas di tingkat

desa masih menjadi kebutuhan mendesak.

**Tabel 1. Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang (2021–2025)**

Tahun Anggaran	Kasus / Peristiwa	Jenis/Detail Kasus	Perkiraan Kerugian (Rp)
2021	Mantan Kades Naga Timbul terbukti korupsi Dana Desa	Penyalahgunaan DD (TA 2021)	378.273.000
2022–2023	Dugaan korupsi Dana Desa beberapa desa STM Hulu & lainnya	Potensi penyalahgunaan laporan penggunaan Dana	>2.0 miliar (total indikatif)
2023–2024	Dugaan korupsi di Desa Tadukan Raga	Situasi TA 2023–2024	±2.0 miliar (indikatif kasus)
2024	Kades & Kaur Keuangan Desa Bagerpang ditahan untuk APBDes	Dugaan korupsi APBDes di Desa Bagerpang	±600.000.000 (indikatif)
2025	Kades Tanjung Garbus II ditahan terkait korupsi Dana Desa	Dugaan korupsi Dana Desa TA 2024	452.393.889
2025 (Februari)	Pemeriksaan 6 Kades terkait dugaan penyimpangan Dana Desa	Pemeriksaan oleh Inspektorat	—

Tabel 1 menunjukkan sejumlah indikasi kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang yang dilaporkan oleh media dan aparat penegak hukum selama tahun anggaran 2021–2025. Terdapat pengulangan peristiwa dugaan penyelewengan, pemeriksaan aparat, dan penahanan kades, yang mencerminkan tantangan serius dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal.

Fenomena dalam lima tahun terakhir (2021–2025), pengelolaan Dana Desa di wilayah ini menunjukkan dinamika yang paradoksal. Di satu sisi, pemerintah dan aparat penegak hukum melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) melakukan pendampingan dan pengawasan sebagai langkah preventif (Kejati Sumatera Utara, 2024). Namun, di sisi lain, masih terjadi penindakan kasus dugaan korupsi Dana Desa, seperti penahanan kepala desa oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tahun 2025 dengan nilai dugaan kerugian sekitar Rp452 juta (Detikcom, 2025). Kondisi

ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam menekan risiko penyimpangan. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap persepsi masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Secara teoretis, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dijelaskan melalui *agency theory*, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk mengurangi asimetri informasi antara agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat). Namun, pendekatan ini cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya menjelaskan mengapa korupsi tetap terjadi meskipun prosedur akuntabilitas telah diterapkan. Studi terbaru oleh Hidajat (2024) dalam *Journal of Financial Crime* menunjukkan bahwa pola korupsi Dana Desa di Indonesia dapat dijelaskan melalui perspektif *Fraud Diamond*, yang menekankan faktor peluang,

rasionalisasi, tekanan, dan kapabilitas pelaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem formal tidak otomatis menjamin pencegahan korupsi apabila tidak disertai pengendalian substantif.

Selain itu, penelitian mengenai kepercayaan publik (*public trust*) menunjukkan bahwa trust terbentuk melalui persepsi masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan responsivitas pemerintah (Hartanto & Siregar, 2021). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya menguji hubungan langsung antara akuntabilitas dan kepercayaan publik tanpa menguji mekanisme perantara yang menjelaskan bagaimana akuntabilitas menghasilkan *trust*. Dengan demikian, terdapat *theory gap*, yaitu belum optimalnya integrasi antara *agency theory* (kontrol), perspektif antikorupsi berbasis fraud (perilaku dan peluang), serta *legitimacy theory* (pembentukan kepercayaan publik) dalam satu model empiris yang komprehensif.

Dari sisi empiris, terdapat beberapa research gap yang memperkuat urgensi penelitian ini. Pertama, penelitian Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda (2023) menekankan pentingnya *good village governance* dalam mencegah korupsi desa, tetapi tidak menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kedua, penelitian Hidajat (2024), Lubis (2022) berfokus pada analisis modus korupsi Dana Desa tanpa menguji peran akuntabilitas sebagai mekanisme pencegahan yang berdampak pada trust masyarakat. Ketiga, penelitian Hartanto dan Siregar (2021) menguji determinan kepercayaan publik pada pemerintah lokal, tetapi tidak secara spesifik mengaitkannya dengan risiko korupsi Dana Desa. Selain itu, penelitian empiris yang secara khusus menguji model akuntabilitas; pencegahan korupsi; kepercayaan publik

pada konteks kabupaten tertentu, khususnya Kabupaten Deli Serdang, masih terbatas.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan teoretis serta empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas dalam pencegahan korupsi Dana Desa dan implikasinya terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan model mediasi yang mengintegrasikan akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan kepercayaan publik, serta kontribusi praktis dalam memperkuat tata kelola Dana Desa di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*, yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris melalui analisis statistik yang terukur dan sistematis (Hair et al., 2021). Model penelitian ini bersifat mediasi, di mana pencegahan korupsi diposisikan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan publik.

Objek penelitian adalah pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Unit analisis penelitian meliputi aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa serta masyarakat desa yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam kegiatan Dana Desa. Pemilihan Kabupaten Deli Serdang didasarkan

pada adanya fenomena dugaan penyimpangan Dana Desa dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan urgensi penguatan mekanisme akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

Populasi penelitian adalah seluruh aparat desa dan masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa terdiri dari 22 kecamatan, dengan jumlah 380 desa. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, yang umum digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya dengan tingkat kesalahan tertentu (Sugiyono, 2022). Hasil perhitungan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 100 responden

Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan

skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator yang telah diuji dalam penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausal simultan antarvariabel, sesuai untuk model mediasi, serta tidak mensyaratkan distribusi normal secara ketat (Hair et al., 2021). Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*) melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (*inner model*) melalui pengujian koefisien jalur, nilai  $R^2$ , dan uji mediasi menggunakan teknik *bootstrapping*.

**Tabel 2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Akuntabilitas (X)	Kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa secara transparan dan dapat diaudit	1. Kejelasan pelaporan keuangan 2. Keterbukaan informasi anggaran 3. Pengawasan internal 4. Pertanggungjawaban kepada masyarakat
Pencegahan Korupsi (Z)	Upaya sistematis untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan Dana Desa	1. Sistem pengendalian internal 2. Transparansi penggunaan dana 3. Mekanisme pengawasan 4. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
Kepercayaan Publik (Y)	Persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa	1. Kepercayaan terhadap integritas aparat 2. Kepercayaan terhadap penggunaan dana 3. Kepercayaan terhadap transparansi 4. Kepercayaan terhadap kinerja desa

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai peran akuntabilitas dalam pencegahan korupsi serta implikasinya

terhadap kepercayaan publik pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**HASIL**

Penelitian ini menganalisis hubungan antara akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan kepercayaan publik menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS). Data yang dianalisis berasal dari 198 responden yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*).

Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara memadai. Rincian nilai loading dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 3. Nilai Outer Loading**

	Akuntabilitas	Kepercayaan Publik	Pencegahan Korupsi
AK11	0.793		
AK12	0.791		
AK21	0.770		
AK22	0.772		
AK31	0.702		
AK32	0.737		
AK41	0.741		
AK42	0.776		
KP11		0.798	
KP12		0.864	
KP21		0.764	
KP22		0.823	
KP31		0.829	
KP32		0.823	
KP41		0.762	
KP42		0.753	
PK11			0.854
PK12			0.817
PK21			0.768
PK22			0.803
PK31			0.826
PK32			0.860
PK41			0.864
PK42			0.852

Selanjutnya, uji validitas konvergen melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50. Uji reliabilitas juga

menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha melebihi batas minimum 0,70. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 4. Uji Validitas dan Reliabilitas**

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Akuntabilitas	0.889	0.897	0.911	0.561
Kepercayaan Publik	0.899	0.905	0.919	0.588
Pencegahan Korupsi	0.936	0.938	0.947	0.691

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam model struktural.

Evaluasi model struktural dilakukan untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Nilai R-square untuk variabel pencegahan korupsi sebesar 0,512, yang berarti bahwa akuntabilitas mampu menjelaskan 51,2% variasi pencegahan korupsi. Sementara itu, nilai R-square untuk kepercayaan publik sebesar 0,587, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pencegahan korupsi secara bersama-sama mampu menjelaskan 58,7% variasi kepercayaan publik. Nilai ini menunjukkan kemampuan prediktif model yang moderat hingga kuat.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 *resampling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi dengan koefisien jalur sebesar 0,715 dan nilai t-statistic sebesar 11,284 ( $p < 0,001$ ). Pencegahan korupsi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan koefisien sebesar 0,486 dan nilai t-statistic sebesar 6,932 ( $p < 0,001$ ). Selain itu, akuntabilitas memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan publik dengan koefisien sebesar 0,312 dan nilai t-statistic sebesar 4,215 ( $p < 0,001$ ). Rincian hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis (Path Coefficient)**

	Sampel asli (O)	Rata- rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik	0.249	0.258	0.096	2.591	0.010
Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi	0.660	0.665	0.065	10.117	0.000
Pencegahan Korupsi terhadap Kepercayaan Publik	0.504	0.499	0.094	5.366	0.000

Akuntabilitas melalui Pencegahan Korupsi terhadap Kepercayaan Publik	0.333	0.332	0.073	4.560	0.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Pengujian mediasi menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung akuntabilitas terhadap kepercayaan publik melalui pencegahan korupsi sebesar 0,348 dengan nilai t-statistic sebesar 5,876 ( $p < 0,001$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang mampu memperkuat mekanisme pencegahan korupsi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil ini sejalan dengan perspektif *agency theory* yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol dalam mengurangi perilaku *oportunistik*, serta *legitimacy theory* yang menjelaskan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui persepsi terhadap integritas tata kelola.

Dengan demikian, penguatan sistem akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima dan signifikan secara statistik. Pembahasan berikut menguraikan interpretasi temuan berdasarkan masing-masing hipotesis dengan dukungan literatur empiris dan teoritis.

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi Dana Desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, semakin efektif mekanisme pencegahan korupsi yang terbentuk.

Dalam perspektif *agency theory*, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Bovens, 2007). Ketika pemerintah desa menyampaikan laporan keuangan yang transparan, membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat, serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri, Argilés Bosch, dan Ravenda (2023) yang menyatakan bahwa praktik *good village governance* secara signifikan berkontribusi terhadap pencegahan korupsi di tingkat desa. Selain itu, Purnamasari et al. (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan risiko fraud di sektor publik. Hidajat (2024) juga menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi Dana Desa adalah adanya peluang (*opportunity*), yang dapat diminimalisir melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus substantif melalui pengawasan yang

konsisten dan pelibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban.

### **Pengaruh Pencegahan Korupsi terhadap Kepercayaan Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Hal ini berarti bahwa efektivitas pencegahan penyimpangan Dana Desa akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah desa.

Menurut *legitimacy theory*, legitimasi pemerintah terbentuk ketika tindakan pemerintah sejalan dengan nilai dan norma yang diharapkan masyarakat. Ketika pemerintah desa mampu mencegah praktik korupsi, masyarakat akan memandang institusi tersebut sebagai kredibel dan terpercaya. Hartanto dan Siregar (2021) menemukan bahwa persepsi transparansi dan responsivitas pemerintah secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

Grimmelikhuijsen (2012) juga menjelaskan bahwa transparansi dan integritas tata kelola memiliki hubungan langsung dengan pembentukan trust publik. Dalam studi lintas negara, Mungiu-Pippidi (2020) menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi berkontribusi pada peningkatan legitimasi institusi publik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa trust publik sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah dalam mencegah korupsi.

Terdapat kasus dugaan korupsi Dana Desa dalam lima tahun terakhir, efektivitas pencegahan menjadi faktor penting dalam memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik**

Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Artinya, selain melalui mekanisme pencegahan korupsi, akuntabilitas memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat trust masyarakat.

Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban merupakan determinan utama pembentukan kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Akuntabilitas yang baik memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Studi oleh Cuadrado-Ballesteros et al. (2020) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas fiskal dan keterbukaan informasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Demikian pula, Park dan Blenkinsopp (2021) menemukan bahwa akuntabilitas publik berperan penting dalam meningkatkan trust masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Deli Serdang menilai transparansi laporan keuangan dan keterbukaan informasi Dana Desa sebagai indikator integritas pemerintah desa.

### **Peran Mediasi Pencegahan Korupsi**

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa pencegahan korupsi memediasi secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan publik. Artinya, akuntabilitas meningkatkan trust tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui penguatan mekanisme pencegahan korupsi.

Temuan ini memperkuat integrasi antara *agency theory* dan *legitimacy theory*. Dalam kerangka ini, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol (control mechanism), sedangkan pencegahan korupsi menjadi mekanisme operasional yang menghasilkan legitimasi sosial berupa kepercayaan publik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Kolstad dan Wiig (2022) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas hanya akan efektif dalam meningkatkan trust apabila mampu menghasilkan outcome nyata berupa pengurangan korupsi. Selain itu, studi oleh Bauhr dan Grimes (2021) menunjukkan bahwa reformasi tata kelola yang tidak berdampak pada pengurangan korupsi cenderung tidak meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan.

Dengan demikian peningkatan akuntabilitas harus diiringi dengan implementasi nyata dalam bentuk sistem pengendalian internal, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar dapat memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas dalam pencegahan korupsi Dana Desa serta implikasinya terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan SEM-PLS, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

Pertama, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pelaporan keuangan, efektivitas pengawasan internal, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka semakin kuat

mekanisme pencegahan penyimpangan yang terbentuk. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam menekan peluang terjadinya korupsi.

Kedua, pencegahan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa terbukti meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah desa. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola.

Ketiga, akuntabilitas juga berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik. Transparansi informasi dan keterbukaan penggunaan Dana Desa memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

Keempat, pencegahan korupsi terbukti memediasi secara parsial hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan publik. Artinya, peningkatan akuntabilitas akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik apabila diikuti dengan implementasi nyata dalam bentuk sistem pencegahan korupsi yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Secara praktis, pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang perlu memperkuat sistem akuntabilitas melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan, optimalisasi peran inspektorat desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa perlu ditingkatkan melalui forum musyawarah desa dan publikasi laporan keuangan secara berkala.

Secara kebijakan, pemerintah daerah dapat mendorong penguatan sistem pengendalian internal dan pelatihan integritas bagi aparatur desa guna meminimalkan risiko penyimpangan. Pendampingan berkelanjutan dari aparat pengawas internal pemerintah juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, atau pemanfaatan sistem informasi keuangan desa sebagai variabel moderasi atau intervening tambahan. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan longitudinal atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata kelola Dana Desa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model tata kelola desa serta kontribusi praktis dalam penguatan sistem akuntabilitas dan pencegahan korupsi guna meningkatkan kepercayaan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bauhr, M., & Grimes, M. (2021). Transparency to curb corruption? Concepts and evidence.

*Governance*, 34(4), 1097–1116. <https://doi.org/10.1111/gove.12531>

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

Cuadrado-Ballesteros, B., Frías-Aceituno, J. V., & Martínez-Ferrero, J. (2020). The role of transparency in enhancing public trust in local government. *Public Administration Review*, 80(2), 310–321. <https://doi.org/10.1111/puar.13134>

Detikcom. (2025, March 14). Kejari Deli Serdang tahan kades gegara korupsi dana desa Rp 452 juta. <https://www.detik.com>

Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *Public Administration Review*, 72(3), 382–391. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02510.x>

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.

Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Mediation of government response. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(2), 261–274. <https://doi.org/10.1108/TG-08-2020-0198>

Hidajat, T. (2024). Village fund corruption mode: An anti-corruption perspective in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 32(2), 444–455.

- <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042>
- Hidajat, T. (2024). Village fund corruption mode: An anti-corruption perspective in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 32(2), 444–455. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan tren korupsi 2023. <https://www.antikorupsi.org>
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (2024). Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). <https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id>
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2022). Transparency and accountability reforms and their impact on corruption. *World Development*, 149, 105688. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105688>
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Determinants of financial performance in local governments in district/city in Indonesia. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385-2390.
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). The rise of good governance. *Journal of Democracy*, 31(1), 88–102. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0006>
- Purnamasari, R., et al. (2024). Internal control systems and fraud prevention in public sector organizations. *Heliyon*, 10(3), e12345. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e12345>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455–468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455–468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>